



Evolusi Teori Akuntansi Sektor Publik: Analisis Perkembangan Dan Tantangan Di Era Digital

Grace P Johana Rajagukguk¹, Lestari Simanjuntak², Maria Grace Pane³, Hendra Harmain⁴, Hamidah⁵

putrigrace246@gmail.com¹, manjutaklestari@gmail.com², mariagrace.pane@gmail.com³,
hendra.harmain@uinsu.ac.id⁴, darmahamidah@gmail.com⁵

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵ STKIP Budidaya Binjai

Article Info

Article history:

Received Januari 15th, 2025

Revised Januari 20th, 2025

Accepted Februari 20th, 2025

Kata Kunci:

Teori Akuntansi Sektor Publik
Evolusi

Digitalisasi

Transparansi

Akuntabilitas

ABSTRAK

Teori akuntansi sektor publik terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan, aturan, dan kemajuan teknologi. Di era digital, akuntansi sektor publik menghadapi tantangan dan peluang baru, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teori akuntansi sektor publik berkembang dari waktu ke waktu, mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji tantangan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, di mana data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan akademisi serta praktisi di bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori akuntansi sektor publik telah berkembang dari sistem yang hanya berfokus pada kepatuhan menjadi lebih transparan dan berbasis kinerja. Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan, tetapi masih ada hambatan seperti keterbatasan aturan, kesiapan tenaga kerja, dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Kesimpulannya, teori akuntansi sektor publik harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif, investasi dalam teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sistem akuntansi sektor publik dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

ABSTRACT

Public sector accounting theory continues to evolve along with changes in policies, regulations, and technological advancements. In the digital era, public sector accounting faces new challenges and opportunities, particularly in terms of transparency, accountability, and financial reporting efficiency. This study aims to examine how public sector accounting theory has developed over time, identify the factors influencing its evolution, and explore the challenges in the digital era. The research employs a qualitative method with a descriptive and exploratory approach, where data is obtained through literature studies and interviews with academics and practitioners in the field. The findings indicate that public sector accounting theory has shifted from a compliance-based approach to a more transparent and performance-based system. Digitalization has helped improve financial reporting efficiency, but challenges remain, such as regulatory limitations, workforce readiness, and uneven technological infrastructure. In

conclusion, public sector accounting theory must continue to adapt to changing times, especially in addressing digital challenges. Therefore, more responsive policies, investment in technology, and workforce capacity development are needed to ensure a more effective and accountable public sector accounting system.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nama Penulis, Grace P Johana Rajagukguk
Affiliation Universitas Negeri Medan
Email : putrigrace246@gmail.com

Latar Belakang

Akuntansi sektor publik memiliki peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, terutama dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, meliputi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Di sisi lain, akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai kewajiban dari pemegang amanah untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, akuntansi sektor publik berfungsi mendukung pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Martadinata, 2024). Perkembangan akuntansi sektor publik umumnya dihubungkan dengan pengelolaan dana publik yang mencerminkan mekanisme pencatatan dan evaluasi keuangan baik pada organisasi pemerintah maupun dalam kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Di Indonesia, praktik akuntansi sektor publik diterapkan di berbagai lembaga, termasuk pemerintah pusat, badan layanan publik, pemerintah daerah, serta lembaga pelayanan masyarakat lainnya (Costari dan Belinda, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah. SAP berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas dan kegunaan informasi keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. SAP bertujuan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan sangat penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, seperti APBN/APBD. APBN/APBD mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi berdasarkan waktu terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas. Dengan adanya transparansi, organisasi sektor publik dapat mengurangi risiko penyimpangan keuangan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, sistem ini juga mendukung pelaporan yang lebih akurat bagi para

pemangku kepentingan untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sabili et al. , 2023).

Meski demikian, implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sistem ini (Hernita et al. , 2021). Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem akuntansi yang lebih modern dan terintegrasi. Penelitian oleh Thuan et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk mempercepat adopsi akuntansi berbasis akrual di sektor public. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep teoritis akuntansi sektor publik, menjelaskan prinsip-prinsip pelaporan keuangan, serta menganalisis perkembangan standar akuntansi dan audit di tingkat nasional maupun internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi sektor publik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Metode Penelitian

Penulis mengadopsi metode pendekatan kualitatif dengan menerapkan kajian pustaka dalam pelaksanaan penelitian. Secara umum, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dirancang untuk merumuskan permasalahan dan kemudian melakukan eksplorasi mendalam melalui berbagai teknik seperti pengamatan, pencatatan, wawancara, serta keterlibatan aktif dalam proses penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, mengembangkan deskripsi, dan menyusun indikator-indikator yang relevan. Kajian pustaka diartikan sebagai suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis mengenai suatu topik berdasarkan teori atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengembangkan landasan teori dalam konteks tinjauan literatur (Kraus et al. , 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka diterapkan melalui pemanfaatan sumber data sekunder, yang mencakup buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Akuntansi Sektor Publik

Perkembangan teori akuntansi sektor publik dari sisi aturan dan kebijakan sangat penting untuk memahami bagaimana akuntansi digunakan dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Akuntansi sektor publik berperan sebagai dasar bagi perekonomian negara karena menyediakan informasi keuangan yang penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan meningkatkan pengelolaan keuangan publik. Banyak faktor yang memengaruhi pembentukan sistem akuntansi sektor publik, seperti bentuk pemerintahan, ketersediaan sumber daya, dan situasi politik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas agar laporan keuangan dapat disusun dengan baik dan sesuai standar (Indrayani, 2024).

Regulasi dan standar akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Salah satu faktor penting adalah peran Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen

Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Tujuan utama regulasi ini adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan dengan baik, terutama sejak era reformasi. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup berbagai elemen penting, seperti perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, hingga pertanggungjawaban organisasi sektor publik (Annisa Handayani et al., 2024).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai pedoman utama bagi entitas publik dalam menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang berlaku untuk entitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual telah menjadi tren di sektor publik karena dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi keuangan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik (Suprianto et al., 2024).

Menggunakan metode akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan sekarang lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar mengerti prinsip akuntansi. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Pengetahuan pegawai pemerintah, terutama yang bekerja di bidang akuntansi, tentang akuntansi berbasis akrual akan mempengaruhi cara mereka menyusun laporan keuangan (Hartono & Ramdany, 2020).

Selain tenaga kerja, ada tantangan lain dalam menerapkan akuntansi sektor publik, seperti penolakan terhadap perubahan. Beberapa tantangan lainnya adalah menjaga kejujuran, keseragaman, kemudahan perbandingan, ketepatan waktu, efisiensi dalam penyajian laporan, serta menentukan informasi yang benar-benar penting. Meskipun akuntansi sektor publik sudah berkembang, masih banyak yang perlu diperbaiki agar laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan besar seiring waktu, dipengaruhi oleh reformasi pemerintahan, otonomi daerah, dan penerapan konsep New Public Management (NPM). Perubahan ini menggeser sistem akuntansi dari yang tradisional menjadi lebih modern dan informatif, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas. Dengan NPM, fokus utama adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas berbasis hasil, dengan mengadopsi cara kerja sektor swasta untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. .

Reformasi dalam pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari perubahan ini, mencakup aspek seperti manajemen berbasis pasar, penganggaran, pengelolaan kinerja, pelaporan keuangan pemerintah, dan audit sektor publik. Akuntansi kini berperan sebagai pendorong perubahan untuk membuat sistem lebih efektif dan efisien, didukung oleh aturan dan standar akuntansi yang kuat. Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran menuju organisasi yang lebih fleksibel sebagai respons terhadap ekonomi yang lebih terbuka dan meningkatnya kebutuhan akan transparansi dalam laporan keuangan kepada masyarakat.

Dampak Digitalisasi terhadap Akuntansi Sektor Publik

Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu akuntansi sektor publik menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi bertujuan untuk mengubah cara kerja pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Teknologi dapat membuat pengelolaan keuangan lebih efisien, seperti dalam penyusunan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Dengan otomatisasi dan sistem yang terintegrasi, proses pelaporan menjadi lebih cepat, mengurangi

kesalahan manusia, dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, teknologi memungkinkan pemerintah menganalisis data keuangan dan non-keuangan dengan lebih baik, sehingga pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan menjadi lebih efektif. Penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data juga membantu membuat laporan keuangan lebih akurat dan mempercepat penyampaian informasi.

Akuntansi digital membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan pencatatan otomatis dan real-time, setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih mudah. Hal ini membuat masyarakat dan pemangku kepentingan lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, teknologi Big Data juga digunakan dalam proses audit di kantor akuntan publik. Sebagian besar responden merasakan manfaatnya, seperti peningkatan kualitas audit (78%), efisiensi kerja (79%), dan kemampuan dalam menilai risiko (85%). Secara keseluruhan, penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi berbasis digital memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan pendapatan daerah, dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi serta akuntabilitas. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lebih dari setengah kabupaten/kota di Indonesia (sekitar 380 daerah) memiliki kapasitas fiskal yang rendah atau sangat rendah. Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan layanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih efektif.

Digitalisasi dalam akuntansi sektor publik membantu membuat pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dengan pencatatan otomatis dan real-time, setiap transaksi bisa dipantau dengan mudah. Sistem digital juga mengurangi proses birokrasi yang rumit, mempermudah akses layanan, dan mempercepat transaksi. Laporan keuangan yang dibuat secara otomatis memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan. Pemerintah dapat menganalisis data keuangan dan non-keuangan dengan lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Teknologi ini juga mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi informasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pelaporan dan pemantauan layanan publik secara real-time, sehingga pemerintah bisa lebih cepat merespons keluhan atau masalah yang muncul.

Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi Sektor Publik di Era Digital

Perkembangan teori akuntansi sektor publik di era digital menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya keterampilan teknologi di kalangan pegawai pemerintah. Banyak dari mereka belum terbiasa menggunakan sistem akuntansi digital, sehingga diperlukan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang cukup, penggunaan teknologi bisa terhambat, membuat upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam akuntansi sektor publik menjadi sulit tercapai.

Selain itu, menghubungkan sistem baru dengan yang lama juga menjadi tantangan. Saat pemerintah mulai menggunakan teknologi akuntansi digital, sering kali sistem baru tidak cocok dengan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, data bisa tidak sinkron, dan pertukaran informasi antar departemen menjadi sulit, sehingga kerja sama dan efisiensi terganggu. Keamanan data juga sangat penting. Semakin banyak teknologi digital digunakan, semakin besar pula risiko serangan siber. Oleh karena itu, pemerintah harus

memastikan bahwa data keuangan yang sensitif terlindungi dengan baik agar tidak bocor atau disalahgunakan.

Kerumitan regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan teori akuntansi sektor publik di era digital. Pemerintah terikat oleh berbagai aturan dan pedoman terkait akuntansi serta pelaporan keuangan. Menyesuaikan sistem akuntansi digital agar sesuai dengan semua regulasi yang berlaku menjadi tugas yang sulit, terutama karena perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan regulasi. Selain itu, penolakan terhadap perubahan dalam budaya organisasi dapat menghambat penerapan teknologi baru. Banyak pegawai merasa lebih nyaman dengan metode kerja lama dan enggan beradaptasi dengan sistem yang lebih modern. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan mendorong inovasi dalam pengelolaan akuntansi sektor publik.

Untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik di era digital, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterampilan pegawai melalui program pelatihan. Pelatihan ini harus mencakup pemanfaatan teknologi terbaru, sistem akuntansi digital, serta kemampuan dalam menganalisis data. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pegawai akan lebih mampu mengoperasikan sistem digital secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, upaya integrasi sistem juga harus menjadi perhatian utama. Standarisasi data dan penerapan teknologi yang mendukung integrasi dapat memastikan bahwa sistem akuntansi digital dapat bekerja secara selaras dengan sistem yang sudah ada. Dengan demikian, pertukaran informasi antar departemen menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Keamanan data sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Untuk melindungi data penting dari serangan siber, pemerintah perlu mengembangkan sistem keamanan yang kuat, menerapkan aturan ketat dalam menjaga data, dan rutin melakukan pemeriksaan keamanan. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan harus selalu diperbarui agar tetap sesuai dengan aturan terbaru. Dengan langkah-langkah ini, sistem akuntansi digital dapat tetap aman dan memenuhi standar serta regulasi yang berlaku.

Terakhir, penting untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan agar inovasi tidak ditolak. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang mendorong penggunaan teknologi baru dengan menjelaskan manfaat digitalisasi secara jelas. Jika pegawai merasa didukung dan mendapatkan pemahaman yang baik, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem baru. Dengan cara ini, sektor publik bisa menghadapi tantangan era digital sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, pengembangan teori akuntansi sektor publik semakin penting untuk memenuhi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mengadopsi teori akuntansi dari sektor swasta tidak selalu sesuai dengan karakteristik sektor publik, yang lebih berfokus pada pelayanan masyarakat dan memiliki sumber pendanaan yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan organisasi dalam sektor publik. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual, seperti IPSAS dan SAP, berpotensi mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Meski begitu pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan tenaga ahli, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta perlunya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam

pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi yang mencakup penelitian empiris, kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem akuntansi sektor publik. Dengan mengembangkan teori dan praktik akuntansi sektor publik yang lebih komprehensif akan membangun dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan standar akuntansi yang lebih efektif. Sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih objektif, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab akademisi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem akuntansi sektor publik yang akuntabel dan transparan.

Daftar Pustaka

- Anjarwati, S., Rosaria Zaena, R., Fitrianiingsih, D., & Sulistiana, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 57–72.
- Annisa Handayani, Juanda Maulana, & Putri Kemala Dewi Lubis. (2024). Studi Literatur: Implementasi Teori Akuntansi Pada Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.100>
- Ayem, S., & Ahamala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(01), 90–102. <http://m.rri.co.id/yogyakarta/politik/1031802/diy-seggera-tindaklanjutan-catatan->
- Bakri, A. A., Yusni, Y., & Botutihe, N. (2023). Analisis Efektivitas Penggunaan Teknologi Big Data dalam Proses Audit: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 179–186. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.641>
- Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Perspektif Luder Contingency Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 95–111. <https://doi.org/10.36982/jieqmk.v12i2.1428>
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Damanik, D. L. D., Muda, I., & Kholis, A. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.48>
- Djasuli, M. (2024). TRANSFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: TANTANGAN DAN. 5(2), 236–243.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 9(1), 39–47. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Hernita, H., Surya, B., Perwira, I., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic business sustainability and strengthening human resource capacity based on increasing the productivity of small and medium enterprises (SMES) in Makassar city, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–37. <https://doi.org/10.3390/su13063177>

- Indrayani, M. A. (2024). *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). 11+Gm+82-92. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Putra, G. H., Sophian, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Padang, K. (2024). Akuntansi Berbasis Digital Di Pemerintahan Dan Pemanfaatannya Untuk Perkembangan Umkm. *JPKBP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 97–110. <https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/JPKBP/article/view/520>
- Randy, M., Mais, R. G., Gie, K., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Jakarta, I. (2024). Tantangan Akuntan Publik Dalam Menyongsong Kemajuan Teknologi Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 2118–7302. <https://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/1205%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/download/1205/1405>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Suprianto, A., Elda Alifah, D., Vikri Subiyakto, M., Huda, A., Safitri Dewi, T., & Studi Akuntansi, P. (2024). Pengembangan Akuntansi Keuangan Pada Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 96–103. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Thuan, P. Q., Khuong, N. V., Anh, N. D. C., Hanh, N. T. X., Thi, V. H. A., Tram, T. N. B., & Han, C. G. (2022). The Determinants of the Usage of Accounting Information Systems toward Operational Efficiency in Industrial Revolution 4.0: Evidence from an Emerging Economy. *Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/economies10040083>
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>